

Dilema Peliputan Terorisme dan Pergeseran Pola Framing Berita Terorisme di Media Massa

*Adam W. Sukarno**

Abstract

News about terrorism appears to be a hot topic in the media. However, the issue of terrorism is still a debate when it appeared in the news room. The issue is related to truth and objectivity of information. Accuracy of information in the process of news coverage in the media were key in putting a story viewed objectively. This article discusses the dilemma faced by journalist in reporting about terrorism and changing pattern of framing of news on terrorism in the mass media.

Kata-kata Kunci:

Terorisme; media massa; kebenaran dan obyektifitas.

*We must report acts of terror quickly, accurately, fully and responsibly. Our credibility is undermined by the careless use of words which carry emotional or value judgements.
(Editorial policy BBC)*

* *Adam W. Sukarno* adalah Asisten Peneliti pada Jurusan Ilmu Komunikasi FISIPOL Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia bisa dikontak melalui email: adam_sukarno@yahoo.com.

Pendahuluan

Fenomena terorisme dan beberapa bentuk tindak kekerasan¹ menjadi gejala umum yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Berbagai pendapat dikemukakan untuk mengungkap latar belakang dan penyebab terjadinya tindakan terorisme. Salah satu pandangan mengatakan bahwa tren radikalisme dan terorisme merupakan akibat dari perubahan konstelasi politik global yang mendorong terbentuknya jenis-jenis pertentangan baru yang salah satunya diidentifikasi melalui penonjolan identitas lokal dan bermuara pada timbulnya konflik-konflik identitas.²

Pada wilayah lokal (Indonesia), fenomena tindak kekerasan dan terorisme semakin sering terjadi pasca orde baru. Ditengarai, pasca orde baru sedikitnya terdapat 47 kelompok yang berpotensi radikal di Indonesia. Pengkategorianya didasarkan dari kampanye kelompok bersangkutan untuk memerangi “barat dan kafir”, serta secara aktif mengupayakan dirinya menjadi kelompok bersenjata.³ Fenomena ini memperoleh momentum yang tepat ketika bangsa Indonesia berada pada masa transisi demokrasi. Tuntutan pada peningkatan kualitas demokrasi dan penguatan civil society dimanfaatkan oleh sebagian orang/ golongan sebagai celah dan alasan untuk melakukan tindakan kekerasan yang dianggap benar dengan argumentasi-argumentasi tertentu.

Sebagai hal yang relatif baru, kekerasan mengatasnamakan terorisme tumbuh menjadi fakta yang mengisi ruang berita di media massa. Hal ini didukung oleh kondisi sosial-politik pasca reformasi tahun 1998 yang membuka ruang publik yang selama ini terkunci rapat. Hak-hak warga negara yang selama orde baru dibungkam oleh rezim penguasa

-
- 1 Ganor melihat bahwa terorisme lebih kepada ancaman tindakan menggunakan kekerasan dengan sasaran warga sipil untuk mencapai tujuan politik tertentu. Sedangkan Schimdt dan Youngman mengutip 109 definisi tentang terorisme. Dari jumlah tersebut 83,5% memaknai terorisme sebagai tindakan kekerasan dan kekuatan. Untuk diskusi bandingkan pendapat Boaz Ganor, 2002. ‘Defining Terrorism Is One Man’s Terrorist Another Man’s Freedom Fighter?’ *Media Asia*, Vol. 29 No. 3 dan Alex P. Schmidt dan Albert I. Jongman, 1983. *Political Terrorism*, New Brunswick, NJ: Transaction Publisher.
 - 2 Beverley Crawford dan Ronie D. Lipschultz (eds), 1998. *Culture and Politic in Indonesia*, Berkeley: International and Area Studies, University of California at Berkeley.
 - 3 ‘Media dan Dilema Seputar Terorisme,’ *Kompas*, 10 Desember 2006, diakses 22 Desember 2006

mulai memperoleh ruang dengan berbagai terobosan yang dilakukan pada masa transisi demokrasi. Beberapa terobosan yang dihasilkan diantaranya terkait dengan jaminan bagi warga negara yang berhubungan dengan keterbukaan akses informasi dan beberapa regulasi media melalui jaminan regulasi. Fase ini sekaligus menjadi momentum bagi media massa dalam melakukan aktifitas jurnalisme berdasarkan asas *freedom of speech* dan *freedom of expression*.

Namun begitu, fakta tersebut tersebut tidak serta merta memberikan jaminan bahwa media massa akan mampu berkembang dengan lebih baik. Justru kegelisahan baru muncul terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh media massa. Apalagi ketika media massa telah berkembang menjadi sebuah industri yang lebih memperhitungkan profit melalui *stressing* pada aspek hiburan ketimbang substansi informasi dan tanggung jawab sosial sebagai agen penyalur informasi yang bermanfaat bagi khalayak.

Persoalan tersebut mengemuka seiring dengan fakta yang menunjukkan bahwa pola kepemilikan media massa di Indonesia berada di tangan pengusaha yang sebagian menyaru menjadi politikus atau setidaknya dekat atau pernah dekat dengan pengambil kebijakan.⁴ Hal ini tentu saja menjadi permasalahan karena independensi dan integritas media massa menjadi dipertanyakan.

Tulisan ini pada dasarnya ingin menguraikan dilema peliputan terorisme oleh media massa Indonesia. Hal ini dipandang penting karena media massa dilingkupi beberapa aspek yang berpotensi mempengaruhi konten media. Keterbatasan ruang bagi media massa dalam meliput realitas terorisme dapat memicu persoalan yang berkaitan dengan hasil akhir peliputan yang berwujud berita. Pada titik inilah, problem obyektifitas informasi mengemuka. Media massa tidak hanya dituntut untuk menghasilkan informasi, namun media massa juga memiliki tanggung jawab agar informasi tersebut bermanfaat bagi khalayak.

4 Industri media mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Itu terlihat dari peningkatan jumlah media massa pasca reformasi. Namun kalau dicermati, peningkatan jumlah kepemilikan media massa tersebut tidak mencerminkan apa yang dinamakan dengan *diversity of ownership*. Cermati artikel Ignatius Haryanto, 2008. 'Industri media membesar, bagus untuk bisnis, tapi untuk demokrasi?' Jurnal Sosial Demokrasi, Volume 3 No. 1 Edisi Juli-September 2008.

Media dan Terorisme

Media dan terorisme menjadi dua tema sentral yang menarik perhatian karena memiliki benang merah pada beberapa aspek. Ross⁵ misalnya, memandang bahwa media massa merupakan lahan kampanye yang penting serta menjadi ruang terbuka bagi diskusi dan perdebatan tentang berbagai hal termasuk terorisme. Sementara Sharma⁶ melihat bahwa titik temu dari dua tema tersebut terletak pada fungsi dasar media massa sebagai aktor penyalur informasi, mendidik khalayak dan menghibur masyarakat dengan keinginan dari kelompok teroris untuk diperhatikan publik. Selain itu, benang merah antara media dan terorisme tidak terlepas dari aspek komersialisasi berita. Pada posisi ini, terorisme merupakan sebuah fakta sosial yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan konsumsi berita di media massa.

Secara jelas, relasi antara media massa dan terorisme dapat dideskripsikan melalui relasi simbiosis mutualisme dimana *Kedua* belah pihak memerlukan satu sama lain dalam sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Media massa memosisikan informasi tidak lebih dari sebuah transaksi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di pasar informasi.⁷ Karenanya, informasi yang sensasional selalu mendapat tempat dalam ruang berita media massa saat. Di sisi lain, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris merupakan fakta sosial yang dapat diolah menjadi fakta media. Fakta tersebut merupakan komoditas bernilai tinggi oleh media massa.

Dalam pandangan serupa, Williams⁸ memaknai bahwa relasi media massa dan terorisme sering dimaknai sebagai *intrinsic mutual dependency* dan *symbiotic*. Terorisme modern memanfaatkan konsep model komunikasi Lasswell untuk menciptakan efek pada diri khalayak melalui beberapa bentuk propaganda teror. Dalam konteks ini, model komunikasi Lasswell

5 Jeffrey Ian Ross, 2007. 'Deconstructing the Terrorism News Media Relationship,' *Journal Crime, Media, Culture*, Vol. 3 No. 2

6 Sanjeev Kumar Sharma, 2006. 'Linkages of Democracy, Terrorism and Media,' *Journal of Politic Science*, Vol II No. 1, hal. 15.

7 Lihat Hermin Indah Wahyuni, 2000. 'Relasi Media-Negara-Masyarakat dan Pasar,' *Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4 No. 2.

8 John W. William, 1999. 'The Failure of Terrorism as Mass Communications,' *Turkish Journal of Police Studies*, Vol. 1 No. 4, hal. 5.

dipandang sebagai instrumen yang mampu menjembatani relasi beberapa bentuk komunikasi mulai dari komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok hingga komunikasi massa.⁹ Beberapa poin tersebut menegaskan bahwa relasi *symbiotic* antara media massa dan terorisme bertemu pada titik kepentingan akan kebutuhan informasi dan keinginan untuk diliput oleh media massa.

Dalam ranah empiris, terungkapnya rencana peledakan bom di Serpong Tangerang semakin menguatkan tesis di atas. Fakta bahwa teroris juga semakin sadar media, terungkap dalam pengungkapan jaringan teroris Pepi Fernando. Jaringan teroris tersebut berupaya meledakkan pipa gas yang secara kebetulan letaknya berdekatan dengan sebuah gereja. Secara sistematis, jaringan teroris Pepi Fernando akan melakukan dokumentasi dan hasilnya akan disebarakan kepada beberapa pihak yang terkait dengan jaringan pendanaan. Untuk memperlancar usaha tersebut, jaringan teroris ini melibatkan satu reporter salah satu televisi swasta yang diberi tugas sebagai aktor yang mendokumentasikan ledakan bom tersebut.

Berita Terorisme: *Truth and Objectivity*?

Berkaitan dengan konteks jurnalisme, salah satu persoalan dasar terkait dengan berita tentang terorisme adalah obyektivitas dan kebenaran. Dalam sebuah proses kerja jurnalistik, obyektivitas dan kebenaran menjadi sebuah nilai yang menentukan kualitas output informasi. Persoalannya kemudian bagaimana *Truth and Objectivity* tersebut dapat dijamin dalam sebuah liputan terorisme? Sebuah ilustrasi menarik dapat dilihat dari pendapat Chermak dan Gruenwald¹⁰ tentang liputan seputar terorisme, khususnya berkaitan dengan tragedi 11 September. Dalam artikelnya, Chermak dan Gruenwald menyebutkan beberapa kendala yang dihadapi jurnalis ketika meliput berita terorisme seperti misalnya akses media, *Frame* media dan nilai-nilai berita. Akses media berkaitan dengan struktur dan distribusi informasi yang melalui penggunaan teknologi sehingga independensi dan obyektifitas informasi dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan *Frame* media dan nilai-nilai berita berhubungan dengan aspek moral tentang tindakan kekerasan, intens, tak terduga, pemahaman tentang

9 *Ibid*

10 Chermak M. Steven dan Gruenewald Jeffrey, 2006. 'The Media's Coverage of Domestic Terrorism.' *Journal Justice Quarterly*, Vol. 23, No. 4

baik dan jahat, serta struktur kekuasaan institusional telah berubah cara pandang media karena peristiwa terorisme. Pada intinya, Chermak dan Gruenwald melihat bahwa terdapat keterbatasan reporter dalam meliput informasi tentang terorisme namun pada sisi lain, implikasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan satu jaminan yang terkait dengan penegakan independensi dan obyektifitas.

Dalam pandangan McQuail¹¹ berita sebagai produk institusi diposisikan memiliki nilai-nilai/ideologi yang melekat pada institusi. Berita memiliki keterbatasan tertentu untuk memenuhi unsur obyektifitas. Sebagai produk sebuah institusi, berita rentan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hal ini dimungkinkan karena institusi surat kabar dianggap memiliki independensi yang terbatas karena hanya dimiliki oleh segelintir orang kuat yang mempunyai keinginan yang sama.

Pada sisi lain, peliputan berita tentang terorisme memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Hal ini disebabkan jaringan terorisme memiliki sistem jaringan sel terputus dan tertutup dengan orang di luar jaringan. Fakta ini menyulitkan reporter dalam memenuhi unsur *truth* dan *objectivity*, terlebih teroris di Indonesia memiliki karakteristik unik karena kelompok teroris jarang melakukan pernyataan bertanggung jawab setelah terjadi tindakan terorisme. Fakta ini berimplikasi bahwa ruang obyektifitas pelaporan informasi menjadi kurang atau bahkan tidak terpenuhi.

Selain itu, kesulitan yang dihadapi oleh jurnalis ketika berada di lapangan dan meliput berita tentang terorisme adalah sisi keseimbangan berita. Berita yang baik memiliki keseimbangan antara pihak-pihak yang diberitakan, antara teroris dan korban pada satu sisi dan pemerintah pada skala yang lebih makro. Narasumber yang biasanya disebut oleh para jurnalis dalam kasus tindak terorisme biasanya berasal dari kalangan militer, polisi atau intelejen yang anonim/*intelligence chatter* karena terbentur kesulitan yang tinggi untuk memperoleh akses langsung ke pelaku terorisme dan jaringannya.

Salah satu contoh nyata dan sederhana dari kendala tersebut dapat terlihat pada laporan utama Majalah *Time* tentang “pengakuan” Umar Al Faruq –yang mengkaitkan “sel-sel tidur” gerakan terorisme di Indonesia dengan Al Qaidah– diperoleh sebagian besar dari sumber yang tidak jelas.

11 Denis McQuail, 1989. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. terjemahan A. Dharma dan A. Ram, Jakarta: Erlangga, hal. 86

Bahkan kronologis Al-Faruq ketika tertangkap di Tangerang Indonesia, kemudian ditahan sementara di Jakarta dan dipindahkan ke Guantanamo hingga kemudian lepas dan tidak diketahui keberadaanya hingga saat ini. Hampir sama halnya dengan cerita kaburnya Selamat Kastari dari penjara di Singapura yang memicu timbulnya banyak pertanyaan. Selamat Kastari yang diberitakan terluka di bagian kaki dapat dengan leluasa lolos dari pengawasan penjara dengan pengawasan maksimum dan lolos dari Singapura.

Informasi dari sumber anonim dalam kaidah jurnalisme memiliki kualitas paling rendah karena narasumber tidak harus mempertanggungjawabkan pernyataannya. Padahal dalam standar kelayakan sebuah berita, jurnalis sebuah media harus melakukan *cross check* kepada narasumber yang bersangkutan sehingga keseimbangan berita dapat dipertanggungjawabkan.

Dua contoh di atas menegaskan bahwa obyektifitas dan kebenaran menjadi dua hal yang sulit diterapkan dalam liputan terorisme. Obyektifitas dan kebenaran setidaknya memerlukan dua indikator pokok yaitu akurasi dan reportase faktual.¹² Permasalahannya, dalam proses kerja jurnalistik, terdapat ruang untuk melibatkan penilaian personal, sehingga obyektifitas dalam jurnalisme tidak lebih mungkin dari obyektifitas yang ada dalam mimpi yang kemudian obyektifitas tergantikan oleh subyektifitas.¹³

Dalam liputan tentang terorisme, tidak disangkal bahwa tuntutan untuk membuat koverasi yang seimbang menjadi sebuah permintaan yang sangat berat. Hal ini berkaitan dengan realitas bahwa terorisme merupakan tindak kejahatan yang berlawanan dengan kemanusiaan. Namun, idealnya proses liputan tersebut hendaknya tetap berdasarkan kepada falsafah dasar jurnalisme yang mengedepankan aspek manfaat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, liputan yang berdasarkan pada kebenaran dan informasi yang sifatnya jelas dan utuh tidak terpotong-potong.¹⁴

12 Anju Grover Chaudhary, 2002. 'The Media's Responsibility in Reporting Terroris.' *Media Asia*, Vol.29, No. 3, hal. 158.

13 *Ibid*

14 Michele Ward Ghetti, 2008. 'The Terrorist is A Star! Regulating Media Coverage of Publicity Seeking Crime, *Federal Communications Law Journal* Vol. 60 No. 481, hal. 500

Melalui pandangan Ross¹⁵, problem koverasi ini terpetakan, yakni dari enam persoalan, yaitu *selective reporting and self-censorship, editorial discretion, lack of specialist focussing on terrorism, misinformation given to reporters by national security agencies, news media obstructing counter-terrorist efforts, sensasionalization*. Akses yang relatif sulit dengan jaringan teroris mengakibatkan informasi yang diperoleh sangat sedikit. Dalam kasus di Indonesia bahkan sangat jarang institusi media massa mampu masuk ke dalam jaringan teroris. Sebagian besar informasi diperoleh melalui pernyataan aparat keamanan/polisi sehingga substansi berita pun sebenarnya dapat diperdebatkan.

Degradasi Kreativitas

Secara teoritis, tugas utama seorang reporter adalah melaporkan realitas sosial yang terjadi ke dalam bentuk fakta media. Proses pelaporan ini terikat oleh beberapa ketentuan untuk mengedepankan fakta dan melaporkan informasi yang memiliki nilai berita. Pelaporan dalam konteks ini dapat diartikan sebagai sebuah proses penulisan apa yang dilihat, didengar dan dialami seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi tujuan politik keredaksian dan memenuhi kebutuhan informasi khalayak.¹⁶ Dalam perspektif yang lebih luas pelaporan informasi tersebut pada dasarnya merupakan rekonstruksi realitas sosial dan rekonstruksi tersebut dituangkan dalam format laporan tertulis. Sebagai bagian dari rekonstruksi realitas sosial, berita dipahami sebagai sebuah laporan tertulis yang bersumber dari cara pandang wartawan ketika melihat fenomena yang terjadi.

Lantas bagaimana dengan realitas terorisme? Fenomena tindak kekerasan ini sebenarnya sama dengan realitas lain yang terjadi dalam masyarakat. Perbedaannya, realitas terorisme dianggap memiliki *news values* yang lebih kompleks. Dalam pandangan Kamath¹⁷ realitas semacam ini memiliki potensi untuk menjadi *big news* karena melibatkan unsur konflik

15 Jeffrey Ian Ross, 2007. 'Deconstructing the Terrorism News Media Relationship.' *Journal Crime, Media, Culture*, Vol. 3, No. 2, hal. 217

16 Ashadi Siregar dkk. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita Untuk Media Massa*. Yogyakarta: Kanisius dan LP3Y, hal. 19

17 MV. Kamath, 1980. *Professional Journalism*. New Delhi: Vikas Publishing House PVT LTD, hal. 94

dan konfrontasi. Dua unsur tersebut kemudian mendorong terbentuknya *news value* seperti misalnya *importance*.

Lebih jauh, pernyataan perang terhadap terorisme yang disampaikan oleh Amerika Serikat pasca tragedi 11 September secara tidak langsung menempatkan entitas teroris sebagai tren pemberitaan kekerasan. Namun, hal ini juga selaras dengan tren pergeseran industri media massa yang kemudian menempatkan berita tidak lebih dari sebuah komoditas. Pokok pikiran penting yang tumbuh dalam konteks ini adalah bagaimana cara 'menjual' berita kepada khalayak.

Lebih jauh, sebagian besar informasi tentang terorisme yang terjadi di Indonesia banyak disajikan dalam bentuk berita langsung. Jenis berita ini pada dasarnya lebih mengutamakan aspek *what*, namun kurang mendukung ketersediaan informasi berjenis *how* dan *why*. Padahal, idealnya liputan seputar terorisme juga menjawab pertanyaan *how* dan *why* melalui sebuah liputan mendalam. Dari sisi teknis peliputan, berita jenis ini memang memerlukan rentang waktu persiapan yang lebih panjang, sehingga hal ini dianggap kurang strategis bagi reporter yang memenuhi kuota berita sejumlah tertentu setiap harinya.

Problem besar yang timbul kemudian mengarah kepada pendangkalan *sense* reporter dalam menyikapi realitas sosial, khususnya realitas terorisme. Secara faktual, reporter dalam melaporkan realitas terorisme memang dihadapkan pada banyak kendala, salah satunya adalah akses reporter dalam memaknai realitas sosial melalui standar dan metode kerja jurnalisme. Tren yang berkembang saat ini mengarah kepada terciptanya degradasi *sense* reporter dalam melihat fakta, menentukan substansi fakta, memunculkan substansi fakta dalam informasi dan menentukan substansi informasi.¹⁸

Salah satu faktor pemicu yang dianggap memiliki sokongan besar terhadap kondisi tersebut adalah tren industrialisasi media yang berimplikasi salah satunya kepada komersialisasi berita. Berita bagus dalam konteks ini dipahami sebagai konten berita yang laku di pasaran, bukan

18 Setidaknya terdapat tiga dosa media dalam liputan kekerasan khususnya liputan bom. *Pertama* adalah pengabaian terhadap asas kepatutan, *Kedua* media massa telah melangkah terlalu jauh dengan menempatkan dirinya sebagai interogator dan *Ketiga* adalah kemalasan media untuk mencari alternatif versi cerita diluar yang disampaikan oleh lembaga resmi. Cermati artikel opini Arya Gunawan, 'Tiga Dosa Media dalam Liputan Bom,' *www.tempointeraktif.com* tanggal 5/8/2009.

lagi berita yang mencerdaskan khalayak. Hal ini menyebabkan khalayak tidak memperoleh informasi yang cukup memadai yang berakibat pada pemahaman yang kurang sempurna terhadap persoalan terorisme.

Idealnya, institusi media massa berani bergerak dalam area yang lebih dalam untuk mengungkap realitas terorisme. Salah satu cara yang dapat dipergunakan adalah menggunakan format *investigative report*.¹⁹ Metode ini dapat mendorong pengungkapan fakta yang lebih komprehensif sehingga isu terorisme dapat dimaknai secara proporsional.

Pergeseran Frame: dari Superhero ke Supermodel

Saat ini, tren peliputan realitas mengalami pergeseran yang luar biasa. Pada awalnya, berita yang dianggap memiliki *news value* dimaknai bila informasi tersebut berkaitan dengan sesuatu atau orang penting. Orang penting sering diartikan dalam pemaknaan pejabat pemerintahan atau birokrasi yang ditempatkan sebagai figur *hero*.²⁰ Sedangkan saat ini, pelaporan realitas sosial lebih mengarah kepada tren bergaya selebritas yang menempatkan obyek realitas sebagai *supermodel*.

Namun begitu, pada dasarnya proses pelaporan realitas sosial oleh insitusi media massa memiliki proses yang sama yakni dipengaruhi oleh sistem operasi media.²¹ Rantai operasi media dalam konteks ini dimulai dari proses peliputan yang dilakukan oleh reporter hingga naik cetak menjadi fakta media. Dalam menyampaikan realitas sosial menjadi fakta

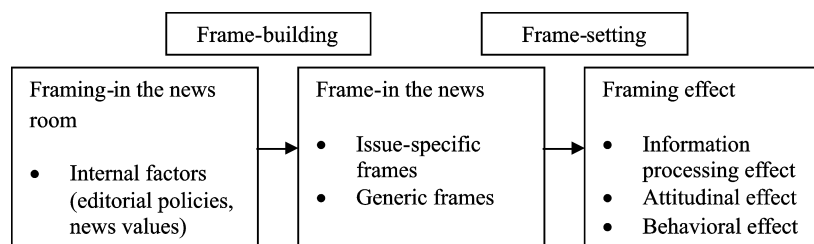
19 Pada dasarnya, proses investigasi dimulai pada saat reporter merasa tidak menerima secara mentah-mentah informasi yang diperolehnya. Kemudian berdasarkan kegelisahannya tersebut, reporter berupaya untuk mengungkap kebenaran informasi melalui riset yang dalam, tekun merekonstruksi suatu kejahatan dan tidak kenal lelah untuk mengejar sumber-sumber yang penting. Lacak lebih jauh dalam Andreas Harsono, 1999. 'Apa Itu Investigative Reporting?' Makalah untuk pelatihan pengantar tentang investigative reporting yang diadakan tabloid mahasiswa Bulaksumur, Universitas Gadjah Mada, 20-24 Februari 1999..

20 *Ibid*

21 Dalam pandangan Shoemaker & Reese sistem operasi media setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal media massa seperti misalnya rutinitas media, faktor individu dan faktor organisasi media massa. Selain itu media juga dipengaruhi oleh elemen di luar media massa atau sering disebut dengan faktor ekstra media seperti misalnya pengiklan dan faktor ideologi media massa. Cermati Pamela Shoemaker & Stephen Reese, 1996. *Mediating the Message of Influence on Media Massa Context*. New York: Longman Publisher

media, media massa setidaknya memanfaatkan tiga komponen, yaitu (1) penggunaan bahasa, (2) strategi pengemasan pesan (*framing strategies*), (3) kesediaan media memberi tempat (*agenda setting function*).²²

Model Proses Framing²³



Sedangkan *Frame* atau 'bingkai' sendiri mempunyai makna luas pada segala bentuk upaya untuk melakukan pembingkaihan terhadap pesan. Pemahaman tersebut tecermin dari pendapat Entman²⁴ yang mendefinisikan *Framing* dari sudut pandang konseptual sebagai :

...to *Frame* is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communication text (...). *Frame* (...) defines problems –determines *what* a causal agent is doing with *what* costs and benefits, usually measured in terms of common cultural values; diagnoses causes – identifies the forces creating the problem; makes moral judgments – evaluates causal agents and their effects; and suggests remedies – offers and justifies treatments for problems and predict their likely effects.

Framing juga dapat dimaknai sebagai sebuah kerangka yang mempengaruhi realitas keseharian, makna pengungkap peristiwa dan alat untuk mempromosikan definisi dan interpretasi terhadap isu tertentu.²⁵

22 Denis Chong dan James N. Druckman, 2007. '*Framing Theory*', terarsip dalam http://faculty.wcas.northwestern.edu/~jnd260/Framing_theory.pdf

23 Ibid

24 Robert M. Entman, 1993. '*Framing: Toward clarification of a Fractured Paradigm.*' *Journal of Communication*. Vol. 43, No. 4, hal. 51-58

25 Chong dan Druckman, Op.cit

Sedangkan indikator *Framing* diukur dari keberadaan kata kunci tertentu, frasa, *stereotip* gambar, sumber informasi dan tema kalimat, pilihan bahasa, kutipan, *metafora*, ungkapan.

Pemanfaatan *Framing* media juga bukan tanpa alasan. Setidaknya terdapat beberapa keuntungan ketika menggunakan *Framing* diantaranya berkaitan dengan otonomi khalayak. Dengan menggunakan *Framing*, makna dominan dapat dinotifikasi sehingga dapat diterima oleh sebagian besar khalayak. *Kedua*, obyektifitas jurnalisme yang merujuk kepada penjelasan bahwa pemanfaatan *Framing* dapat mendukung terciptanya informasi yang obyektif.

Fakta yang berkembang menunjukkan bahwa persoalan kemampuan reporter untuk mengakses jaringan teroris dan tren penggunaan narasumber dari satu kelompok (aparatus kepolisian), mengakibatkan isu terorisme rentan untuk mengalami pergeseran. Pergeseran *Frame* berita terorisme ini pada satu sisi dapat dipandang sebagai sebuah bentuk intervensi negara untuk mengontrol informasi tentang terorisme. Praktik intervensi untuk memperkuat legitimasi di mata rakyat tersebut dikenal sebagai *Bonapartism state*. Berdasarkan perspektif sosio-historis, *Bonapartism* dapat dimaknai melalui dua pandangan, yakni sebagai gerakan politik dan ideologi politik. Sebagai gerakan politik, *Bonapartism* merujuk kepada sebuah gerakan untuk mengembalikan kejayaan kekaisaran Perancis di bawah Napoleon Bonaparte. Sedangkan dalam kacamata ideologi politik, *Bonapartism* dapat dimaknai sebagai sebuah gagasan tentang negara yang tersentralisasi secara kuat berdasarkan pada dukungan rakyat.

Dalam pandangan lain, *Bonapartism* dipergunakan untuk menggambarkan sebuah pemerintahan yang terbentuk pada saat kekuasaan kelas tidak aman sehingga *state apparatus* seperti militer, polisi dan birokrasi 'dipaksa' untuk ikut campur tangan dalam menegakkan hegemoni. Dengan kalimat lain, untuk menanggulangi kerusakan sistem yang telah tercipta sebagai akibat pertentangan kelas, intervensi negara diperlukan untuk menyelamatkan sistem.²⁶

Pertanyaannya kemudian bagaimana pergeseran *Frame* tersebut menjadi indikasi *Bonapartism state*? Dari sudut pandang jurnalisme,

26 Marx secara jelas telah menggambarkan bahwa kegagalan kelas dominan dalam menguasai dan menegakkan hegemoni dapat berakibat pada timbulnya instabilitas negara. Cermati tulisan Arief Budiman, 2007. 'Kebudayaan Kekuasaan atau Sosiologi Kekuasaan.' *Prisma*, Vol. 16 No. 16 3

ketidakberimbangan informasi yang disebabkan narasumber sepihak sangat rentan menghasilkan informasi yang tidak obyektif. Terlebih ketika ada upaya untuk mengontrol media melalui pemanggilan pemimpin redaksi media.

Tabel 1. Frame Terorisme di Media

Periode	Frame
Sebelum 1998	Dikenal dengan sebutan ekstrem kanan atau gerakan radikal berbasis agama tertentu.
1999 s/d 2000	Belum ada sebutan teroris, sebelumnya pernah dikenal istilah gerakan pengacau keamanan (GPK).
2001 s/d 2008	Sebutan teroris mulai muncul pasca ledakan bom Bali I dan tragedi 11 September 2001. Pada saat itu, gerakan Islam Radikal melalui representasi Jamaah Islamiyah (JI), pondok pesantren Ngruki. Pada era ini aktivis terorisme dikaitkan dengan orang atau kelompok orang yang pernah menimba ilmu di Moro dan Afghanistan yang menyerang simbol-simbol Barat dan Amerika Serikat.
2009	Beberapa saat setelah peledakan hotel the Ritz-Charlton yang <i>Kedua</i> , SBY menyatakan bahwa kejadian tersebut memiliki kaitan dengan pihak-pihak yang kecewa dengan hasil pilpres. Sesaat setelah pernyataan tersebut, <i>Frame</i> terorisme sempat bergeser kepada rival politik SBY yang pada saat itu berusaha menggugat hasil rekapitulasi perhitungan suara KPU terkait dengan dugaan pengelembungan DPT.
2009 s/d sekarang	JAT dianggap sebagai perpanjangan JI melalui tokoh sentral Abu Bakar Ba'asyir.

Kesimpulan

Merebaknya kekerasan dan tindakan bernuansa terorisme di Indonesia adalah salah satu indikator bahwa negara tidak lagi memiliki kuasa dan wibawa yang cukup kuat untuk mengatur, mengarahkan dan melindungi rakyatnya. Dalih kebebasan dan demokrasi bukan merupakan dasar alasan pembenar yang tepat untuk melakukan tindakan yang dapat mencederai semangat kerukunan, kemanusiaan dan persatuan.

Kekerasan dan tindakan terorisme merupakan salah satu bentuk kegelisahan beberapa golongan dalam masyarakat dalam melihat realita yang terjadi pada saat ini. Globalisasi, neo-kapitalisme, terpaan budaya barat yang semakin tidak terbandung dan rasa terancam serta kehilangan identitas diri dan eksistensi di masa depan merupakan beberapa permasalahan yang harus segera dicarikan jalan keluarnya.

Media massa merupakan entitas yang strategis sebagai tempat untuk menyampaikan informasi. Sebagai sebuah lembaga yang disangsikan kenetralannya, media mempunyai banyak kemungkinan untuk melakukan 'perselingkuhan' dengan banyak hal yang dapat memberikan berita bagus dan bernilai jual bagi media, termasuk dari pelaku tindakan terorisme.

Liputan berita tentang pelaku tindakan terorisme dalam media mempunyai dua implikasi, diantaranya adanya pencitraan dan pengakuan eksistensi pelaku kekerasan dan pelaku terorisme dari sisi pelaku terorisme serta perolehan berita bernilai 'jual' yang dinanti oleh khalayak pembaca dari pihak media massa.

Lebih jauh, kesulitan dalam mengakses narasumber dari pihak teroris mengakibatkan *Frame* berita memiliki potensi besar untuk bias. Hal ini disebabkan karena keberimbangan berita tidak terpenuhi sehingga obyektifitas berita dapat dipertanyakan. Padahal, persoalan obyektifitas berita menjadi isu utama dalam proses kerja jurnalistik. Bertitik tolak dari hambatan yang dihadapi oleh reporter dan tuntutan untuk selalu menampilkan informasi yang menarik bagi khalayak, reporter dan institusi media massa tidak bisa melupakan fungsinya sebagai agen yang mendidik masyarakat. Di level ini, seharusnya timbul kesadaran bahwa setiap informasi yang disampaikan harus memberikan pencerahan kepada khalayak atau setidaknya bermanfaat bagi khalayak. Indikator yang dapat dipergunakan adalah menempatkan berita sebagai ruang belajar bagi khalayak. Dengan membaca konten berita, khalayak dapat belajar bersikap dalam menghadapi persoalan yang sama di masa mendatang. *****

Daftar Pustaka

- Budiman, Arief. (2007). 'Kebudayaan Kekuasaan atau Sosiologi Kekuasaan.' *Prisma*, Vol. 16 No. 16 3.
- Chaudhary, Anju Grover. (2002). 'The Media's Responsibility in Reporting Terroris.' *Media Asia*, Vol.29 No. 3.
- Chermak, Steven M. dan Jeffrey Gruenewald. (2006). 'The Media's Coverage of Domestic Terrorism,' *Justice Quarterly*, Vol. 23 No. 4.
- Chong, Denis dan James N. Druckman. (2007). *Framing Theory*, tersip dalam http://faculty.wcas.northwestern.edu/~jnd260/framing_theory.pdf.
- Crawford, Beverley dan Ronie D. Lipschultz (eds). (1998). *Culture and Politic in Indonesia*. Berkeley: International and Area Studies, University of California at Berkeley.
- De Vreese, Claes H. (2005). 'News Framing Theory and Typology.' *Information Design Journal*, Vol. 13, No. 1.
- Entman, Robert M. (1993). 'Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm.' *Journal of Communication*, Vol. 43, No.4
- Ganor, Boaz. (2002). 'Defining Terorism Is One Man's Terrorist Another Man's Freedom Fighter?' *Media Asia*, Vol. 29 No 3.
- Ghetti, Michele Ward. (2008). 'The Terrorist is A Star! Regulating Media Coverage of Publicity Seeking Crime.' *Federal Communications Law Journal*, Vol. 60 No. 481.
- Harsono, Andreas. (1999). 'Apa Itu Investigasi Reporting?' Makalah untuk pelatihan pengantar tentang investigative reporting yang diadakan tabloid mahasiswa Bulaksumur, Universitas Gadjah Mada, 20-24 Februari 1999.

Haryanto, Ignatius. (2008). 'Industri media membesar, bagus untuk bisnis, tapi untuk demokrasi?' *Jurnal Sosial Demokrasi*. Vol. 3 No. 1 Edisi Juli-September.

<http://www.marxists.org/glossary/terms/b/o.htm>

Kamath, MV. (1980). *Professional Journalism*. New Delhi: Vikas Publishing House PVT LTD.

Kompas. (2006). 'Media dan Dilema Seputar Terorisme,' *Kompas Online*, 10 Desember 2006, diakses 22 Desember 2006.

McQuail, Denis. (1989). *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Terjemahan A. Dharma dan A. Ram. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Ross, Jeffrey Ian. (2007). 'Deconstructing the Terrorism News Media Relationship.' *Journal Crime, Media, Culture*, Vol. 3 No. 2.

Sharma, Sanjeev Kumar. (2006). 'Linkages of Democracy, Terrorism and Media.' *Journal of Political Science*. Vol II No. 1.

Schmid, Alex P. dan Albert I. Jongman. (1983). *Political Terrorism*. New Brunswick, NJ: Transaction Publisher.

Shoemaker, Pamela J. & Reese, Stephen. (1996). *Mediating the Message of Influence on Media Massa context*. New York: Longman Publisher.

Siregar, Ashadi. (1998). *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita Untuk Media Massa*. Yogyakarta: Kanisius dan LP3Y.

Tempo. (2009). 'Tiga Dosa Media Dalam Liputan Bom.' *tempointeraktif.com*, 5 Agustus 2009, diakses 6 September 2009.

Wahyuni, Hermin Indah. (2000). 'Relasi Media-Negara-Masyarakat dan Pasar.' *Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4 No. 2.

William, John W. (1999). 'The Failure of Terrorism as Mass Communications,' *Turkish Journal of Police Studies*, Vol. 1 No. 4.